

TUNAIKAN AMANAT SECARA ADIL

Oleh Nurcholish Madjid

Hadirin sidang Jumat yang terhormat.

Hubungan takwa dan keadilan telah saya ulas dalam beberapa kesempatan khutbah yang lalu. Pada khutbah kali ini, saya ingin meneruskan bahasan mengenai keadilan. Tema itu memiliki relevansi sangat kuat dengan persoalan-persoalan kita saat sekarang. Pernah kita kutip firman Allah *swt* yang menjelaskan bahwa menegakkan keadilan adalah tindakan yang paling mendekati takwa.

“Tegakkanlah keadilan, itulah yang lebih mendekati takwa,” (Q 5:8).

Ayat ini dikaitkan dengan peringatan Allah *swt* bahwa dalam menegakkan keadilan, kita jangan sampai terpengaruh oleh hubungan suka atau tidak suka kepada seseorang. Walaupun kita sedang diliputi kebencian, keadilan harus tetap dilaksanakan. Demikian juga ketika kita diliputi oleh suasana senang dan suka cita.

“Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum, menyimpangkan kamu dari keadilan,” (Q 5:8).

Dalam ilmu-ilmu sosial dijelaskan bahwa tindakan manusia yang paling mungkin melanggar keadilan ialah tindakan menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu kekuasaan dalam agama kita harus

dipandang sebagai amanat Allah *swt.* Dan amanat itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya,” (Q 4:58).

Ayat di atas menyebutkan kata jamak “amanat-amanat.” Artinya, banyak sekali amanat yang kita terima. Semua kelebihan yang ada pada kita adalah amanat. Harta yang ada pada kita adalah amanat Allah. Begitu juga pengetahuan kita dan apa saja yang membuat hidup kita ini menjadi lebih baik. Semua hak istimewa kita adalah amanat. Firman Allah ini dilanjutkan dengan ayat yang secara khusus menyebut pemerintahan sebagai sesuatu yang harus dijalankan dengan adil dalam kaitannya dengan amanat.

“Dan kalau kamu menjalankan pemerintahan di kalangan umat manusia, maka jalankanlah pemerintahan itu dengan adil,” (Q 4:58).

Harta adalah juga amanat Allah *swt.* Bahkan al-Qur’an menyebutkan bahwa harta adalah sesuatu di mana kita ditunjuk untuk menguasainya. Makna penunaian amanat harta kepada yang berhak ialah melaksanakan fungsi sosial harta. Yaitu selain dimanfaatkan untuk keperluan kita dan keluarga, juga disalurkan sebagian kepada masyarakat yang memerlukan.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya,” (Q 57:7).

Dalam agama kita, pemilikan harta bersifat suci. Hak kita untuk memiliki harta tidak boleh diganggu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau seseorang meninggal dalam rangka membela hartanya yang halal dan sah, maka dia mati syahid. Nabi

bersabda, “*Barangsiapa mati membela hartanya yang sah maka dia itu adalah mati syahid,*” (HR Bukhari-Muslim).

Hadis ini memberi gambaran sangat kuat bahwa harta sebagai milik yang sah adalah suci. Namun kepemilikan harta dalam Islam bukan kepemilikan mutlak, melainkan hanya bersifat titipan. Ini berbeda dengan kapitalisme yang memandang pemilikan harta bersifat mutlak, sehingga seorang pemilik harta boleh melakukan apa saja kepada hartanya. Mau dibuang ke laut, dibakar, atau diwasiatkan kepada binatang juga boleh.

Kalau kita baca koran, tidak jarang kita temukan berita bagaimana seorang kaya meninggalkan wasiat agar kalau dia mati hartanya diberikan kepada anjingnya. Sementara keluarganya sendiri tidak mendapat apa-apa. Menurut hukum di Amerika, wasiat itu harus dilaksanakan. Dalam Islam tidak demikian. Pembelanjaan harta dalam Islam harus dilakukan sesuai petunjuk Allah, bahwa pertama-tama harta dibelanjakan untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat. Dalam hukum waris pun kita tidak boleh meninggalkan wasiat supaya harta kita diberikan kepada suatu badan sosial lebih dari sepertiga. Karena tentu kita mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,” (Q 4:9).

Kendati demikian, harta tetaplah amanat. Kita bisa bandingkan harta dengan kekuasaan. Bahkan kekuasaan adalah amanat yang lebih penting untuk diawasi. Karena di antara semua fasilitas dan kemudahan dalam hidup ini, yang paling mudah disalahgunakan ialah kekuasaan. Dalam bahasa asing ada istilah-istilah yang sering memperingatkan kita tentang bahaya kekuasaan, seperti “*power tends to corrupt*” (kekuasaan itu cenderung untuk curang) dan

“absolut power corrupt absolutly” (kekuasaan yang mutlak akan menjadi curang secara mutlak).

Maka dari itu, dalam agama kita tidak diizinkan adanya kekuasaan yang mutlak. Dalam bahasa Arab disebut sebagai *thāgūt*. Kemudian sering diterjemahkan sebagai tiran. Dan contoh *thāgūt* yang paling banyak disebutkan al-Qur'an adalah Fir'aun. Seperti firman Allah kepada Musa:

“Pergilah Musa kepada Fir'aun itu, sebab dia itu sudah menjadi tiran,”
(Q 20:24).

Dan perjuangan Musa ialah perjuangan dari seorang pembebas melawan seorang penindas. Eksodus besar-besaran bangsa Israel dari Mesir ke Palestina adalah lambang dari pembebasan manusia dari perbudakan dan penindasan. Al-Qur'an berkali-kali menceritakan eksodus ini. Ini semua mengandung perjuangan moral mengenai perjuangan abadi manusia melawan tiran semenjak manusia mengenal kekuasaan, yang secara historis itu dimulai oleh bangsa Sumeria, di lembah sungai Efrat dan Tigris — orang Yunani menyebutnya sebagai Mesopotamia, artinya lembah antara dua sungai — sekitar 60.000 tahun lalu. Sejak itu manusia menjalani penyalahgunaan kekuasaan. Maka kekuasaan tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat. Dalam perkembangan modern ini pengawasan itu dilembagakan dalam bentuk serikat-serikat independen, yang kemudian memperoleh nama “masyarakat madani” (*civil society*). *Civil society* adalah soko guru masyarakat yang sehat. *Civil society* model masyarakat madani adalah pelaksana kewajiban untuk mengontrol pemerintah yang dalam bahasa al-Qur'an adalah pelaksana amar makruf nahi mungkar (menganjurkan yang baik dan mencegah yang salah). Ini semua dalam rangka penegakan keadilan tersebut.

Dalam al-Qur'an diingatkan bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan ialah melindungi tindakan-tindakan yang salah. Wujud penyalahgunaan kekuasaan tidak saja berupa tindakan salah

dari seorang penguasa secara langsung, tetapi juga berupa langkah mereka untuk melindungi kesalahan orang lain melalui rekayasa kekuasaan. Rekayasa menutup kesalahan orang lain itu, misalnya tergambar dalam sebuah ayat tentang hubungan ekonomi:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,” (Q 2:188).

Sering terjadi kenyataan pahit dalam masyarakat, bahwa seseorang yang dari sudut pandang lain diketahui berbuat salah ternyata secara legal formal kesalahannya tak terbukti. Ayat di atas menerangkan gejala demikian itu. Dalam kenyataannya, hukum memang bisa diputarbalikkan. Bisa direkayasa. Ada pameo di kalangan orang Amerika, *“all lawyers almost liars”* (para ahli hukum hampir semua adalah penipu). Bukan penipu dalam arti kejahatan, tapi mereka punya keahlian menciptakan *legal device* (muslihat hukum) sehingga suatu perbuatan yang salah tiba-tiba jadi benar.

Menyikapi harta hasil KKN, misalnya, kita mengalami kesulitan. Banyak sekali harta yang dihasilkan dari KKN, namun tertutup oleh lapisan *legal device* yang sulit sekali ditembus. Maka yang paling utama diperlukan ialah kesadaran keadilan pada pribadi masing-masing. Kemudian kesadaran keadilan yang bersifat personal ini harus diletakkan dalam kerangka sosial dan struktural. Proses demikian dapat kita pelajari dari surat *al-Ashr*.

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran,” (Q 103:1-3).

Surat *al-‘Ashr* menjelaskan bahwa manusia ini merugi, kecuali mereka yang beriman. Keimanan menyimpan komitmen keadilan. Namun keimanan baru bersifat komitmen personal. Keselamatan tidak cukup diraih hanya dengan iktikad baik. Iktikad baik baru berfungsi membawa keselamatan, baik individual maupun sosial, kalau dimanifestasikan dalam perbuatan baik, *wa ‘āmilū ‘l-shālihāt*.

Setelah penampakan amal baik, untuk mencapai keselamatan masyarakat, menurut surat *al-‘Ashr*, diperlukan adanya mekanisme yang memungkinkan anggota-anggota masyarakat saling mengingatkan mana yang baik dan benar. Dalam terjemahan modernnya dikenal sebagai kebebasan menyatakan pendapat yang merupakan salah satu kebebasan asasi manusia.

Mengapa mekanisme kontrol saling mengingatkan penting? Mengapa tidak cukup dengan iman dan amal saleh? Karena iman adalah masalah personal yang tidak bisa diukur dan dikontrol dari luar. Kita malah tidak boleh menilai iman orang lain. Itu bukan wewenang kita. Nabi pernah mengatakan, “*Aku tidaklah diutus untuk membelah dada manusia*”.

Kemudian, amal saleh masih bisa mengundang debat karena ada problem interpretasi. Mungkin saja kita memahami sesuatu sebagai hal yang benar padahal sebetulnya salah. Mungkin kita memahami sesuatu itu bermanfaat, tapi sebetulnya berbahaya. Kita masih sering tidak bisa lepas dari dikte hawa nafsu (keinginan pribadi) kita.

Kita cenderung melihat sesuatu itu baik kalau cocok dengan keinginan kita. Kita cenderung melihat sesuatu itu benar kalau sejalan dengan pikiran kita. Maka kita kehilangan objektivitas. Di situ mulai berbahaya. Kalau seseorang sudah mengklaim dirinya tahu mana yang baik, lalu minta diikuti, maka ia telah terperosok dalam otoritarianisme. Dan otoritarianisme adalah permulaan dari *thāghūt* (tiran).

Di sinilah arti penting mekanisme saling mengingatkan. Maka tidak cukup hanya dengan iman dan amal saleh. Juga harus ada kebebasan yang cukup untuk mengingatkan apa yang baik dan benar. Ini untuk menjaga kemungkinan penguasaan hawa nafsu. Mungkin ada orang yang sangat tinggi motivasinya untuk berbuat

baik, tapi sebetulnya yang dia klaim sebagai kebaikan itu bukanlah kebaikan. Dia tidak tahu itu, karena ia dikuasai tirani *vested interest* atau hawa nafsu.

Dalam mekanisme yang memungkinkan adanya *tawāshaw bi 'l-haqq* itu tadi, maka kemudian ada musyawarah. Secara bahasa musyawarah adalah proses saling memberi isyarat. Dalam ilmu sharaf (gramatika Arab), kata musyawarah mengikuti *wazan musyārah* artinya menunjukkan tindakan timbal-balik, yaitu tindakan saling memberi isyarat.

Banyak orang yang tidak tahan bermusyawarah, terutama ketika menghadapi kemungkinan ternyata dirinya salah. Memang yang paling berat pada diri kita ialah mengakui kesalahan sendiri. Sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Melayu, “Kuman di seberang lautan tampak, sementara gajah bertengger di pelupuk mata tidak nampak”. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain betapapun jauh dan kecil, namun susah mengakui kesalahan diri sendiri biar pun besar dan dekat. Itulah sebabnya, menurut surat *al-‘Ashr*, tidak cukup dengan *tawāshaw bi 'l-haqq* (saling menasehati kebenaran), tetapi juga harus dengan *tawāshaw bi 'l-shabr* (saling menasehati agar sabar).

Sabar itu sendiri mempunyai dimensi waktu. Pembuktian kebenaran sejati memerlukan waktu. Menegakkan keadilan juga perlu waktu. Tidak bisa instan. Apalagi bila kebenaran itu menyangkut masyarakat yang besar. Di sana ada *human investment* atau tanaman kemanusiaan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan hasilnya adalah satu generasi. Apa yang kita mulai sekarang ini, dalam skala besar, baru dua puluh tahun lagi akan betul-betul terwujud. Ahli pendidikan umumnya mengatakan, kalau kau tanam jagung, tunggulah tiga bulan baru panen, kalau kamu tanam kelapa, sabarlah lima tahun untuk panen. Tapi kalau tanamnya adalah *human investment*, mendidik manusia, menegakkan keadilan, dan sebagainya, maka kamu harus sabar menunggu satu generasi.

Lihatlah tanaman Pak Harto. Baru terbukti salah setelah 30 tahun. Maka demikian juga yang benar. Kebenaran yang sekarang

kita mulai, akan terbukti betul-betul benar kira-kira 20 tahun lagi. Maka dari itu harus ada *wa tawāshaw bi 'l-shabr*. Para ahli tafsir modern mungkin akan menerjemahkan *wa tawāshaw bi 'l-shabr* itu sebagai keharusan adanya *time scheduling*.

Syarat *wa tawāshaw bi 'l-shabr* yang dimensinya sedemikian rupa itu, sekaligus merupakan peringatan bahwa menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Tidak bisa sekarang kita mulai dan besok kelihatan hasilnya. Lebih sulit lagi meluruskan kesadaran psikologis berupa kesediaan untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah dan untuk secara rendah hati melihat kemungkinan orang lain benar.

Maka dari itu, kebebasan yang kita nikmati beberapa bulan ini, besok akan membawa kebahagiaan. Kita baru akan belajar bebas. Kebebasan bukan kategori statis, tapi adalah sesuatu yang dinamis. Dia mewujudkan bersama pengalaman kita, eksperimentasi kita, dan upaya kita mencoba hidup. Maka dari itu ada dimensi sabar. Demikian juga mengawasi pemerintah, harus belajar. Sebab kalau tidak, bisa kontra-produktif. Nabi Musa saja yang oleh Allah dilengkapi dengan mukjizat yang begitu hebat dan musuhnya adalah lambang tirani yang begitu dahsyat (Fir'aun), namun diberi pesan:

“Maka berbicaralah kamu berdua (Musa dan Harun) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut,” (Q 20:44).

Ini juga satu dimensi kesabaran. Sebab kalau kita hanya menu-ruti retorika keras maka efektivitas menjadi pertanyaan. Meskipun barangkali secara emosional kita puas. Tapi itu hanya pemuasan emosi belaka. Memang, mengikuti jalan lurus seperti yang dikehendaki Allah *swt* adalah sangat sulit. Itu harus kita perjuangkan dalam hidup ini dengan penuh kesungguhan. Di situlah kita ketemu dengan istilah *mujāhadah*, *jihād*, *ijtihād*, dan sebagainya. Semuanya mengacu kepada kerja keras dan sungguh-sungguh. [❖]